

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN PEMEGANG POLIS SEBAGAI ANGGOTA PERTANGGUNGAN PADA ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 PONTIANAK

**Oleh:
Frocky Faldio**

Abstract

AJB Bumiputera 1912 is a company that is widely used to transfer risk. Where the insured is binding to the insurer to accept a number of premium that has been agreed. Bumiputera in the insurance business is not a form of PT and CV it is a "joint venture". Therein lies the difference between a company AJB Bumiputera 1912 with insurance companies as it is clearly visible in the position of the holder of the policy. This study aims to determine the legal relationship between the policyholder by the company AJB Bumiputera 1912 and to learn about the interests of policy holders as a member of the AJB Bumiputera 1912've got protection. This study used a normative study. Legal relationship that occurs between the policyholder with a life insurance company Bumiputera 1912 Joint has occurred when the agreement is further evidenced by an insurance policy. interests of policyholders represented by a representative body of members (BPA), which is the highest organ of the company in accordance with the company in the form of joint venture. In a collaborative effort, the risk borne by the participants themselves as the owner of the company. Interests of all policyholders AJB Bumiputera 1912 can be channeled through representative bodies in which members will determine and oversee the company.

Key words: legal aspects, the insurer, the insured

Abstrak

AJB Bumiputera 1912 adalah sebuah perusahaan yang banyak digunakan untuk mengalihkan risiko. Dimana tertanggung mengikatkan diri kepada penanggung dengan menerima sejumlah premi yang telah disepakati. Dalam usaha perasuransian ini Bumiputera bukanlah berbentuk PT maupun CV melainkan sebuah "usaha bersama". Disinilah letak perbedaan antara perusahaan AJB Bumiputera 1912 dengan perusahaan asuransi lainnya yang jelas terlihat pada kedudukan pemegang polisnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antara pemegang polis dengan Perusahaan AJB Bumiputera 1912 dan Untuk mengetahui tentang kepentingan pemegang Polis sebagai anggota pada AJB Bumiputera 1912 sudah mendapat perlindungan. Dalam penelitian ini digunakan penelitian normatif. Hubungan hukum yang terjadi diantara pemegang polis dengan perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 telah terjadi ketika adanya kata sepakat yang kemudian dibuktikan oleh suatu polis asuransi. kepentingan dari pemegang polis terwakilkan oleh badan perwakilan anggota (BPA) yang mana merupakan organ tertinggi dalam perusahaan sesuai dengan bentuk perusahaannya yang berbentuk usaha bersama. Dalam usaha bersama, risiko dipikul oleh para peserta sendiri sebagai pemilik perusahaan. Kepentingan dari seluruh pemegang polis AJB Bumiputera 1912 dapat tersalurkan melalui badan perwakilan anggota yang mana ikut menentukan serta mengawasi jalannya perusahaan.

Kata kunci : Aspek hukum, penanggung, tertanggung

Pendahuluan

Sejak dahulu manusia telah berusaha untuk selalu mendapatkan pegamanan. Pada mulanya rasa aman timbul apabila ada tersedianya makanan dan tempat tinggal. Hal tersebut yang memungkinkan adanya asuransi sebagai tempat untuk mengambil alih resiko. Pada masyarakat berkembang, peran individu didalam sistem ekonomi menjadi semakin terarah kepada kebutuhan akan keamanan bersifat ekonomi yang berpengaruh terhadap resiko yang harus ditanggung oleh tertanggung. Resiko itu terjadi dalam peristiwa tidak tertentu (evenement), akan tetapi pasti terjadi yang waktunya tidak diketahui.

Pada masyarakat modern menyediakan banyak contoh apa yang disebut resiko. Misalnya asuransi ganti kerugian, seseorang badan hukum dan non badan hukum menghadapi kerugian secara ekonomis, disebabkan oleh terbakarnya rumah, kantor dan perusahaan. Demikian halnya asuransi jiwa, manusia yang pasti akan mati tapi tidak tahu kapan waktunya namun (tertanggung) mengasuransikan jiwanya. Walaupun banyak metode untuk menangani resiko, namun asuransi merupakan metode yang paling banyak dipakai. Asuransi menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung terhadap resiko yang dihadapi perorangan maupun perusahaan.

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.¹

Perusahaan asuransi merupakan suatu lembaga yang sengaja dirancang dan dibentuk sebagai lembaga pengambil alih dan penerima resiko. Dengan demikian, perusahaan asuransi pada dasarnya menawarkan jasa proteksi sebagai bentuk produknya kepada masyarakat yang membutuhkan, dan selanjutnya diharapkan akan menjadi pelanggannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan asuransi akan mengajak setiap pihak untuk bergabung ataupun bekerjasama untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan kerugian yang mungkin terjadi yang biasanya tidak disadari dan tidak siap dihadapi.

Asuransi membawa misi ekonomi sekaligus sosial dengan adanya premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi dengan jaminan adanya pengalihan (transfer) resiko

¹ Ketentuan Pasal (1) angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

dari tertanggung kepada penanggung. Asuransi sebagai mekanisme pemindahan resiko dimana seseorang atau badan hukum memindahkan sebagian ketidakpastian sebagai imbalan pembayaran premi. Definisi resiko disini adalah ketidakpastian terjadi atau tidaknya suatu kerugian.

Dengan adanya kegunaan positif tersebut maka keberadaan lembaga asuransi perlu dipertahankan dan dikembangkan. Namun untuk mengembangkan usaha ini banyak faktor yang perlu diperhatikan seperti antara lain : peraturan perundang-undang yang memadai, kesadaran masyarakat, kejujuran para pihak, pelayanan yang baik, tingkat pendapatan masyarakat, pemahaman akan kegunaan asuransi serta pemahaman yang baik terhadap ketentuan perundang-undangan yang baik terhadap ketentuan perundang-undangan yang terkait.²

Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian dalam KUHPerdato berlaku juga bagi perjanjian asuransi. Karena perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus, maka di samping ketentuan-ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian, berlaku juga syarat-syarat khusus yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Dalam penelitian ini, penulis lebih mengkhususkan terhadap asuransi jiwa pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Kedudukan terhadap pemegang polis pada perusahaan ini yang menjadikan menarik untuk dikaji lebih mendalam. selain itu bumiputera juga memiliki sebuah badan yang dibuat untuk mewakili seluruh pemegang polis.

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera ini merupakan asuransi jiwa tertua di Indonesia. Bumiputera memulai usahanya tanpa modal yang didirikan oleh beberapa orang. Pada awal berdirinya Bumiputera hanya melayani para guru sekolah Hindia Belanda kemudian perusahaan memperluas jaringan ke masyarakat umum. Hingga sekarang Bumiputera telah mampu menjadi usaha perasuransian nasional yang sangat besar.

Salah satu kekuatan Bumiputera adalah bentuk perusahaan dan kepemilikan yang unik, dimana Bumiputera merupakan satu-satunya perusahaan yang berbentuk “mutual” atau usaha bersama, artinya pemilik perusahaan adalah pemegang polis, bukan pemegang saham. Jadi perusahaan tidak berbentuk PT atau Koperasi. Hal ini dikarenakan premi yang diberikan kepada perusahaan sekaligus dianggap sebagai modal.³ Pemegang polis pada asuransi yang berbentuk usaha bersama ini dianggap sebagai pemilik perusahaan sehingga kekuasaan

² Sastrawidjaja, M. Suparman, Endang, 1992, *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, alumni, Bandung hlm 1.

³ BUMIPUTERA, 2009, *Petunjuk Operasional Pemasaran*, Mardimulyo, Jakarta, Hlm.2

tertinggi berada pada pemegang polis.⁴ Hal tersebut tertuang didalam Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

Mengingat tentang kedudukan dari pemegang polis maka, pemegang polis tersebut sudah pasti memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan dengan pemegang polis atau nasabah pada perusahaannya lainnya. Pemegang polis pada AJB Bumiputera ikut dilibatkan dalam kepengurusan atau pengawasan dalam jalannya perusahaan. Disamping itu pemegang polis juga dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap apa yang dirasa belum terlaksana.

Pemegang polis tersebut diwakilkan oleh Badan Perwakilan Anggota. Yang dimaksud anggota pada Bumiputera adalah pemegang polis warga Negara Indonesia yang mempunyai kontrak dengan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912, mengenai jiwanya sendiri maupun jiwa orang lain dalam hal yang bersangkutan bertindak sebagai pemegang polis asuransi jiwa kumpulan dari suatu Badan Hukum Indonesia. Polis-polis yang dimiliki sebagaimana ketentuan tersebut merupakan tanda anggota. Setiap anggota Bumiputera 1912 mempunyai hak memilih dan dipilih menjadi anggota BPA dalam setiap pemilihan anggota BPA untuk daerah pemilihan dimana yang bersangkutan berdomisili.⁵

Jadi dengan demikian kedudukan pemegang polis dalam Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tentu memiliki peran yang sangat penting terhadap perusahaan. disamping menjadi nasabah yang berkewajiban memenuhi prestasinya pemegang polis juga mempunyai kelebihan wewenang untuk mengawasi perusahaan itu sendiri.

Kedudukan dari pemegang polis pada perusahaan AJB Bumiputera 1912 jelas berbeda dengan pemegang polis pada perusahaan asuransi lainnya yang memposisikan nasabahnya hanya sebatas pemegang polis yang tidak lebih tinggi kedudukannya dalam perusahaan.

Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah yaitu :

1. Bagaimana hubungan hukum antara pemegang Polis Asuransi dengan Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 ?
2. Apakah kepentingan pemegang Polis sebagai anggota pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sudah mendapat perlindungan ?

⁴ Kompas Gamedia. 2009 *Asuransi Bumiputera*, edisi khusus November .

⁵ Pasal 7 Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912

Pembahasan

A. Pengertian Perjanjian

Pada umumnya, suatu perjanjian dinamakan juga sebagai suatu persetujuan, oleh karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa antara perjanjian dan persetujuan itu adalah sama artinya. Dimana persetujuan atau yang dinamakan *Overeenkomsten* yaitu “suatu kata sepakat antara dua pihak atau lebih mengenai harta benda kekayaan mereka, yang bertujuan mengikat kedua belah pihak”.⁶

Pasal 1313 KUHPerdato mengemukakan “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.⁷ Wiryono Prodjodikoro mengemukakan bahwa:

Suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara 2 (dua) pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.⁸

Dengan hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan suatu bentuk perikatan. Pada Pasal 1233 KUHPerdato dikatakan bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”. Dalam hal ini ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan yang secara sengaja dibuat oleh para pihak, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti perikatan adalah “hubungan hukum antara 2 (dua) atau lebih orang (pihak) dalam bidang/ lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut”.⁹

Selain Wiryono Prodjodikoro, ada beberapa sarjana yang memberikan rumusan tentang definisi perjanjian, antara lain: Menurut R. Subekti: “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain, atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu”.¹⁰

⁶ Prodjodikoro Wirjono, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Penerbit Sumur, Bandung, hlm. 11

⁷ Kitab Undang-undang Hukum Perdata

⁸ Ibid hlm 11

⁹ Muldjadi Kartini dan Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan Pada Umumnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 17

¹⁰ Subekti R., 2005, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta. hlm. 29

Beliau juga mengatakan “bahwa suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena 2 (dua) pihak setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat juga dikatakan bahwa 2 perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya”.¹¹

Berdasarkan rumusan di atas, dapat diketahui bahwa perjanjian adalah sumber utama dan yang terpenting untuk melahirkan perikatan. Dimana terdapat berbagai unsur-unsur yang penting dari suatu perjanjian yang melahirkan perikatan, unsur-unsur tersebut adalah:

1) Adanya hubungan hukum

Hubungan hukum adalah hubungan yang terhadapnya hukum melekat hak pada satu pihak dan melekatkan kewajiban pada pihak lainnya. Apabila satu pihak tidak mengindahkan ataupun melanggar hubungan tadi lalu hukum memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi ataupun dipulihkan kembali. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka hukum memaksakan agar kewajiban tadi dipenuhi.

2) Kekayaan

Kriteria perikatan yang dimaksud adalah ukuran-ukuran yang dipergunakan terhadap sesuatu hubungan hukum saling hubungan hukum dapat disebutkan suatu perikatan. Dahulu yang menjadi kriteria itu adalah hubungan hukum itu, dapat dinilai dengan uang atau tidak. Apabila hubungan hukum itu dapat dinilai dengan uang, maka hubungan hukum tersebut merupakan suatu perikatan. Kriteria itu semakin lama semakin sukar untuk dipertahankan keberadaannya, karena di dalam masyarakat terdapat juga hubungan hukum yang tidak dapat dinilai dengan uang. Namun kalau terhadapnya tidak diberikan akibat hukum, rasa keadilan tidak akan dipenuhi, sehingga hal pun ini bertentangan dengan salah satu tujuan dari pada hukum yaitu mencapai keadilan. Oleh karena itu, sekarang kriteria di atas tidak lagi dipertahankan sebagai kriteria, maka ditentukan bahwa sekalipun suatu hubungan hukum itu tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi kalau masyarakat atau rasa keadilan menghendaki agar suatu hubungan itu diberi akibat hukum, maka hukum pun akan melekatkan akibat hukum pada hubungan tadi sebagai suatu perikatan.

3) Pihak-pihak

Hubungan hukum itu terjadi antara 2 (dua) orang atau lebih pihak yang berhak atas prestasi, pihak yang aktif adalah kreditur atau yang berpiutang dan pihak yang wajib memenuhi prestasi, pihak pasif adalah debitur atau yang berutang. Inilah yang disebut subjek perikatan.

¹¹ Ibid hlm 12

4) Prestasi (objek hukum)

Pasal 1234 KUHPdata:”tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

Keempat unsur tersebut akan mewujudkan suatu perjanjian yang mewujudkan suatu perjanjian yang melahirkan perikatan, dimana terdapat hubungan-hubungan hukum yang terjadi atas diri dan harta kekayaan para pihak yang mengadakan perjanjian. Sedang disisi lain hukum meletakkan hak pada satu pihak lain dan meletakkan kewajiban pada pihak lainnya. “Apabila satu pihak tidak mengindahkan atau melanggar hubungan tadi atau dalam bahasa hukum disebut wanprestasi maka hukum memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi atau dipulihkan”.¹²

B. Pengertian Asuransi Jiwa

Pengertian berdasarkan pasal angka (1) Undang-Undang No 2 yang memberi batasan sebagai berikut : “Asuransi atau pertanggungan jiwa adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”

Pengertian berdasarkan Purwasutjipto mengemukakan definisi Asuransi Jiwa sebagai berikut: “Pertanggungan jiwa adalah perjanjian timbal balik antara penutup (pengambil) asuransi dengan penanggung, dengan mana penutup asuransi mengikatkan diri selama jalannya pertanggungan membayar uang premi kepada penanggung, sedangkan penanggung sebagai akibat langsung dari meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungkan atau telah lampaunya suatu jangka waktu yang diperjanjikan, mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk oleh penutup asuransi sebagai penikmatnya.”

Mengenai definisi sederhana dari pertanggungan jiwa yaitu: pertanggungan jiwa adalah perjanjian timbal balik antara penutup (pengambil) asuransi dengan penanggung dimana penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan pada saat ditutupnya pertanggungan kepada pengguna asuransi yang didasarkan atas hidup dan matinya seseorang yang ditunjuk.¹³

¹²Badrulzaman Mariam Darus, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, hal. 27.

¹³ Purwasutjipto, H.M.N. 1996, *Perlindungan Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pertanggungan*, Djambatan, Jakarta, hlm. 139

Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa Asuransi Jiwa adalah suatu perjanjian antara tertanggung (pemegang polis) dengan penanggung (Perusahaan Asuransi) dalam bentuk premi dan pihak tertanggung berhak memperoleh pembayaran sejumlah uang apabila terjadi peristiwa atau musibah tertentu.

Menurut Emy Pangaribuan yang dikutip oleh Khotibul Umam, perjanjian asuransi atau pertanggungan memiliki sifat – sifat sebagai berikut :¹⁴

- a) Perjanjian asuransi atau pertanggungan pada dasarnya adalah suatu perjanjian penggantian kerugian atau schadeverzekering atau indemniteits contract. Penanggung mengikatkan diri untuk menggantikan kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan yang diganti itu adalah seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita atau prinsip indemnitas.
- b) Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian bersyarat. Kewajiban mengganti rugi dari penanggung hanya dilaksanakan kalau peristiwa yang tidak tertentu atas mana diadakan pertanggungan itu terjadi.
- c) Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian timbal balik.
- d) Kewajiban penanggung mengganti rugi diharapkan dengan kewajiban tertanggung membayar premi.
- e) Kerugian yang diderita adalah sebagai akibat dari peristiwa yang tidak tertentu atas mana diadakan pertanggungan.

Polis adalah suatu akta sebagai tulisan sepihak, dimana diuraikan dengan syarat-syarat apa asurador menerima perjanjian asuransi¹⁵ Sedangkan menurut ketentuan Pasal 255 KUHD, perjanjian pertanggungan harus dibuat secara tertulis didalam sebuah akta yang disebut polis. Polis ini sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi pertanggungan antara penanggung dengan tertanggung. Di dalam polis tersebut disebutkan bahwa semua ketentuan dan persyaratan tentang pertanggungan yang telah dibuat.¹⁶

Polis adalah suatu akta sebagai tulisan sepihak, dimana diuraikan dengan syarat-syarat apa asurador menerima perjanjian asuransi. Secara material, perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungan adalah satu, apabila sudah dicapai kata sepakat diantara para pihak. Penanggung maupun tertanggung keduanya sudah sepakat atas semua syarat yang sudah disepakati bersama.

¹⁴ Umam, Khotibul. 2011, *Memahami Dan Memilih Produk Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.hlm.15

¹⁵ H.Mashudi & Moch. Chidir Ali, 1998, *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 59

¹⁶ Muhammad Abdulkadir, 1990, *Pokok-pokok Hukum Pertanggungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.58

Premi adalah salah satu unsur penting dalam asuransi karena merupakan kewajiban utama yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung. Besarnya jumlah premi oleh tertanggung ditentukan berdasarkan penilaian risiko yang dipikul oleh penanggung. Premi asuransi merupakan syarat mutlak untuk menentukan perjanjian asuransi dilaksanakan atau tidak. Kriteria premi asuransi adalah dalam bentuk sejumlah uang, dibayar lebih dahulu oleh tertanggung, sebagai imbalan pengalihan resiko, dihitung berdasarkan presentase terhadap nilai resiko yang dialihkan, dalam jumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung.

C. Dasar Hukum Asuransi

a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Perjanjian Asuransi tidak termasuk perjanjian yang secara khusus diatur dalam KUHPerdata, tetapi pengaturannya dalam KUHD. Walaupun demikian berdasarkan Pasal 1 KUHD ketentuan umum perjanjian dalam KUHPerdata dapat berlaku pula bagi perjanjian Asuransi untuk kepentingan pemegang polis yang terdapat beberapa ketentuan dalam KUHPerdata yang perlu diperhatikan. Ketentuan yang dimaksud antara lain:

1. Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan bahwa : “ suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. ”
2. Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu:
 - a. sepakat mereka yang mengikat diri
 - b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
 - c. suatu hal tertentu
 - d. suatu sebab yang halal
3. Pasal 1318 KUHPerdata yang mengenai ahli waris dari pemegang polis / tertanggung dalam perjanjian asuransi yang mempunyai hak untuk dilaksanakan prestasi dari perjanjian tersebut.
4. Untuk mencegah penanggung menambah syarat-syarat lainnya dalam memberikan ganti rugi atau sejumlah uang, maka sebaiknya pemegang polis memperhatikan ketentuan Pasal 1253 sampai dengan Pasal 1262 KUHPerdata
5. Pasal 1338 KUHPerdata ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. ” Oleh karena itu pemegang polis dan penanggung terikat untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuatnya. Selanjutnya pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata berbunyi:

“perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.” Dengan demikian apabila misalnya pemegang polis terlambat membayar premi, maka penanggung tidak secara sepihak menyatakan perjanjian Asuransi batal. Dilain pihak pemegang polis pun demikian pula. Pasal 1338 KUHPerdara ayat (3) yang menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

6. Pasal 1339 KUHPerdara yang melahirkan asas kepatuhan berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut: “suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.”
7. Pasal 1342 sampai dengan pasal 1351 KUHPerdara yang mengenai penafsiran perjanjian harus diperhatikan pula oleh para pihak yang mengadakan perjanjian asuransi.
8. Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melanggar hukum dapat juga dipergunakan oleh pemegang polis apabila dapat membuktikan penanggung telah melakukan perbuatan yang merugikannya.

b. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)

Sebagai sumber pengaturan yang utama dari perjanjian Asuransi terdapat dalam KUHD. Pengaturan Asuransi dalam KUHD adalah sebagai berikut:

1. Buku I bab X diatur tentang beberapa jenis Asuransi yaitu Asuransi terhadap bahaya kebakaran, Asuransi terhadap bahaya-bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen dan tentang Asuransi Jiwa
2. Buku II Bab IX mengatur tentang Asuransi terhadap bahaya laut dan bahaya pembudakan.
3. Bab X tentang Asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan di daratan, di sungai dan di perairan darat.¹⁷

Dalam peraturan Asuransi ada ketentuan yang bersifat memaksa dan peraturan yang bersifat menambah. Contoh ketentuan yang bersifat memaksa adalah seperti yang diatur dalam pasal 250 KUHD yang artinya sebagai berikut : “Bahwa untuk dapat ditutupnya perjanjian asuransi disyaratkan tertanggung harus mempunyai kepentingan” Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka penanggung tidak diwajibkan memberikan ganti

¹⁷ S.Suparman M. dan Endang, 1993, *Hukum Asuransi*, Alumni,Bandung hlm. 16

kerugian.¹⁸ Dalam hubungan dengan perlindungan kepentingan pemegang polis asuransi, dalam KUHD terdapat beberapa peraturan lainnya yaitu :

- a. Pasal 254 KUHD yang melarang para pihak dalam perjanjian, baik pada waktu diadakan perjanjian maupun selama berlangsungnya perjanjian asuransi menyatakan melepaskan hak-hak yang oleh ketentuan Undang-undang diharuskan sebagai pokok suatu perjanjian asuransi ataupun hal-hal yang dengan tegas telah dilarang. Apabila hal demikian dilakukan mengakibatkan perjanjian Asuransi batal. Ketentuan ini diberlakukan terutama untuk mencegah supaya perjanjian Asuransi tidak menjadi perjudian dan pertaruhan. Untuk kepentingan polis hal itu dapat terjadi seperti contoh sebagai berikut: “telah ditutupnya perjanjian Asuransi antara pemegang polis dengan penanggung. ”

Setelah Asuransi berjalan beberapa lama kemudian pihak penanggung menyatakan hal-hal seperti yang dilarang dalam Pasal 254 KUHD tersebut.¹⁹

- b. Pasal 257 KUHD

Pasal 257 KUHD merupakan penerobosan dari ketentuan pasal 255 KUHD. Pasal 255 KUHD menyatakan bahwa asuransi harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis. Memperhatikan pasal 255 KUHD tersebut seolah-olah polis merupakan syarat mutlak untuk terbentuknya perjanjian Asuransi. Hal itu ternyata tidak benar apabila diperhatikan Pasal 257 KUHD.

Dalam Pasal 257 KUHD disebutkan : “Bahwa perjanjian Asuransi diterbitkan seketika setelah ditutup, hak dan kewajiban bertimbal balik dari penanggung dan tertanggung mulai berlaku sejak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani. ”

Dengan demikian perjanjian Asuransi merupakan perjanjian konsensual sehingga telah terbentuk dengan adanya kata sepakat kedua belah pihak. Dalam hal polis hanya merupakan alat bukti saja. Dalam hubungan dengan hal ini apabila kedua belah pihak telah menutup perjanjian Asuransi tetapi polisnya belum dibuat, maka tertanggung tetap berhak menuntut ganti rugi apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi. Adapun yang harus dilakukan oleh tertanggung adalah membuktikan bahwa perjanjian Asuransi dimaksud terbentuk.²⁰

- c. Pasal 258 KUHD mengenai pembuktian adanya perjanjian

¹⁸ Ibid, hlm.16

¹⁹ Ibid hlm.17

²⁰ Ibid hlm.19

Asuransi. Disebutkan bahwa untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut diperlukan pembuktian dengan tulisan, namun demikian alat pembuktian yang lain juga boleh dipergunakan apabila sudah ada permulaan pembuktian dengan tulisan. Istilah tulisan dalam bagian permulaan pasal tersebut dapat diartikan sebagai polis. Tetapi istilah tulisan dalam bagian terakhir harus diartikan surat yang bukan polis.

- d. Pasal 269 KUHD yang mengatur bahwa dalam perjanjian Asuransi dianut peristiwa yang belum pasti terjadi secara subyektif. Maksudnya bahwa apabila Asuransi ketika ditutup, peristiwanya sudah terjadi adalah batal jika tertanggung atau orang yang atau tanpa pemberian kuasa telah mengadakan perjanjian Asuransi, telah mengetahui bahwa kerugian atau peristiwa tersebut telah terjadi. Dengan demikian apabila tertanggung belum mengetahui bahwa kerugian/peristiwa telah terjadi, maka perjanjian tersebut tidak menjadi batal.²¹
- e. Peraturan Perundang-undangan Lainnya
 - 1) Undang-undang No 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, yaitu Pasal 1 tentang Asuransi pada umumnya dan Pasal 6 tentang Asuransi Jiwa
 - 2) Keputusan Menteri Keuangan RI No 1250/KMK.013/1998 tanggal 20 Desember 1998 tentang usaha asuransi jiwa.

D. Kekuatan Hukum Polis Yang Mengikat

Tidak seperti perusahaan lain yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) Bumiputera 1912 sejak awal pendiriannya menganut model kepemilikan yang unik, berbentuk “usaha bersama”. Dengan model ini semua pemegang polis sejatinya adalah pemilik perusahaan yang menunjuk wakil mereka untuk duduk di Badan Perwakilan Anggota. Secara sederhana, asas usaha bersama dapat dikatakan dari peserta, oleh peserta, dan untuk peserta.

Pemegang polis memiliki hubungan hukum yang tertuang dalam polis. Menurut ketentuan pasal 225 KUHD perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis yang memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (penanggung dan tertanggung) dalam mencapai tujuan asuransi. Dengan demikian, polis merupakan alat bukti tertulis tentang telah terjadinya perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung.

²¹ Ibid hlm.24

Di Bumiputera pemegang polis yang juga disebut anggota, sangat menonjol, bahkan dianggap sebagai pemilik perusahaan. Sebagai pemilik perusahaan, pemegang polis/anggota memegang kekuasaan tertinggi, yang menentukan garis besar kebijakan penyelenggaraan usaha asuransi jiwa. Kekuasaan tertinggi dari pemegang polis atau anggota itu dituangkan dalam bentuk Rapat Pemegang polis atau Anggota atau melalui Perwakilan Pemegang Polis/ Anggota.

Mengenai daya kekuatan pembuktiannya, Harahap menyebutkan bahwa untuk Akta di Bawah Tangan memiliki 2 (dua) jenis daya kekuatan yang melekat padanya yaitu:

1) Daya Kekuatan Pembuktian Formil;

Kekuatan pembuktian formal akta dibawah tangan sama dengan kekuatan formal akta otentik. Dalam hal ini berarti telah terdapat suatu kepastian bagi siapa pun, bahwa si yang bertandatangan dalam akta di bawah tangan tersebut menyatakan seperti apa yang ada di atas tanda tangan tersebut.

2) Daya Pembuktian Materiil.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 1875 KUHPdata berarti isi keterangan akta di bawah tangan tersebut berlaku penuh terhadap si pembuat dan untuk siapa pernyataan tersebut dibuat. Akta di bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya, dalam kekuatan pembuktian hampir sama dengan akta otentik, bedanya terletak pada kekuatan bukti lahir atau kekuatan bukti keluar yang tidak dimiliki oleh akta di bawah tangan.

Dengan demikian, berdasarkan pada penjelasan tersebut diatas, maka apabila para pihak telah memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas, yaitu para pihak telah mengakui kebenaran akta/polis tersebut, maka polis tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1875 KUHPdata.

E. Bentuk Perusahaan ‘Mutual’ atau Usaha Bersama di Bumiputera

Menurut sejarahnya, ciri-ciri utama usaha bersama di bidang asuransi adalah:

- 1) Besarnya premi yang harus dibayar tidak tetap. Dalam perkembangannya, premi tidak tetap ini juga digunakan oleh perusahaan yang berbentuk lain dari usaha bersama.
- 2) Usaha bersama tidak memerlukan modal. Hal inilah yang membedakan bentuk usaha bersama dengan Perseroan Terbatas (PT) .
- 3) Pada dasarnya, usaha bersama tidak mengejar laba. Jika ada surplus dari hasil usahanya, maka surplus itu dibagikan kepada para pesertanya.

- 4) Asuransi dengan bentuk usaha bersama bersandar pada asas risiko murni, sedang bentuk Perseroan Terbatas dengan premi tetapnya dapat saja menerapkan asas risiko spekulatif, jadi ada unsur laba yang diharapkan dari modal yang ditanamkannya.
- 5) Dalam usaha bersama, risiko dipikul oleh para peserta sendiri sebagai pemilik perusahaan, sedang pada Perseroan Terbatas, perusahaanlah yang memikul risikonya.

Di Indonesia, bentuk usaha bersama secara khusus tidak dikenal, tetapi hukum adat Indonesia pada umumnya memberikan tempat bagi praktek gotong royong menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat yang luas, seperti desa, sedangkan di Eropa khususnya di Belanda, praktek usaha bersama benar-benar dikaitkan dengan kegiatan usaha di suatu bidang usaha tertentu. Asas mutualisme yang kemudian dipadukan dengan idealisme dan profesionalisme pengelolanya, merupakan kekuatan utama Bumiputera hingga hari ini. Keunikan suatu usaha bersama yang patut dibanggakan. Cara ini agaknya tak merintangi gerak langkah Bumiputera untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang lebih modern, justru kekuatan tersebut ada untuk memadukan kepemilikan bersama dan profesionalisme dalam pengelolaannya.

Peranan Asas usaha bersama perusahaan asuransi jiwa disebabkan oleh tiga alasan pokok, yaitu:

- 1) Secara filosofi sudah diterima secara universal bahwa misi dari penyelenggaraan asuransi adalah untuk melayani kepentingan para pemegang polis tertanggungnya.
- 2) Secara moral, modal yang terhimpun oleh perusahaan asuransi jiwa, akhirnya sebagian besar atau bahkan seluruhnya berasal dari pemegang polis/ tertanggungnya.
- 3) Karena alasan historis, yaitu warisan budaya masa lalu yang memiliki nilai-nilai luhur di bidang kemasyarakatan, yang tidak hanya dilestarikan di Indonesia atau di Asian umumnya tetapi juga dilestarikan dan dikembangkan di Eropa.

Bentuk badan “Usaha Bersama (Mutual)” ini tertuang dalam Undang-undang No.2/1992, pasal 7 (1) dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 504/KMK.06/2004.. Dalam usaha bersama, risiko dipikul oleh para peserta sendiri sebagai pemilik perusahaan (berbeda dengan PT, dimana perusahaanlah yang menanggung risikonya)

F. Kedudukan Pemegang Polis Dalam Perusahaan AJB Bumiputera

Dalam Perusahaan AJB Bumiputera memang sedikit berbeda dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang tidak berbentuk perusahaan “mutual” atau perusahaan bersama. Pemegang polis disini sekaligus dapat menjadi perwakilan terhadap anggota pertanggungan

AJB Bumiputera yang lainnya dan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan. Hal tersebut tercantum dalam Keputusan Direksi Tentang Struktur Organisasi AJB Bumiputera 1912 yang menetapkan BPA (Badan Perwakilan Anggota) adalah organ tertinggi di AJB Bumiputera 1912.

Azas-azas umum yang dianut secara universal dalam penyelenggaraan usaha bersama asuransi jiwa, yaitu :

1. Peranan pemegang polis (disebut anggota) sangat penting bahkan dianggap sebagai pemilik perusahaan.
2. Sebagai pemilik perusahaan , pemegang polis memegang kekuasaan tertinggi, yang menentukan garis besar kebijakan penyelenggaraan usaha asuransi jiwa.
3. Kekuasaan tertinggi dari pemegang polis dituangkan dalam Rapat Pemegang Polis atau melalui Perwakilan Pemegang Polis.

Pemilik perusahaan mutual adalah setiap pemegang polis yang menjadi anggota Badan (AJB Bumiputera 1912). Anggota Badan adalah Pemegang Polis Warga Negara Indonesia yang mempunyai kontrak asuransi jiwa dengan Badan, mengenai jiwanya sendiri maupun jiwa orang lain, dalam hal yang bersangkutan bertindak selaku pemegang polis Asuransi Kumpulan dari suatu badan Hukum Indonesia.

BPA bertugas antara lain, menentukan pokok-pokok Kebijakan Perusahan dan mengadakan pengawasan umum. Yang dapat dipilih menjadi anggota BPA adalah Anggota Bumiputera 1912 yang polisnya masih aktif dan berlaku, serta sudah berjalan sekurang-kurangnya 2 tahun sebelum pemilihan dilaksanakan, dan kontrak asuransinya belum akan berakhir dalam masa 5 (lima) tahun berikutnya. Badan Perwakilan Anggota (BPA) Bumiputera adalah pemegang polis/ anggota yang dipilih berdasarkan suara terbanyak untuk daerah pilihannya dimana yang bersangkutan berdomisili. Setiap anggota Bumiputera, mempunyai hak memilih dan dipilih menjadi anggota BPA dalam setiap pemilihan.

Dari penjelasan yang telah ada maka pemegang polis dimaksud merupakan nasabah yang juga sebagai pemilik perusahaan. Pada perusahaan, pemegang polis benar-benar terwakilkan oleh Badan Perwakilan Anggota yang sengaja dibentuk dan dipilih dari pemegang polis yang diberi kedudukan tertinggi dalam perusahaan. Pemegang polis dalam kedudukannya ikut serta mengawasi dan menentukan kebijakan perusahaan sehingga kepentingan dari anggota pemegang polis dapat terwakilkan dalam perusahaan dengan masuknya BPA dalam menentukan haluan perusahaan.

Penutup

1. Hubungan hukum antara pemegang polis dengan pihak asuransi terjadi bilamana adanya kata sepakat antara kedua belah pihak yang dibuktikan dengan sebuah akta yang disebut polis, hal tersebut mengingat perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersifat konsensual.
2. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Merupakan satu-satunya perusahaan di Indonesia yang berbentuk “Usaha Bersama” atau “Mutual” (non Perseroan Terbatas), dimana pemegang polis merupakan pemilik perusahaan. Bentuk badan “Usaha Bersama (Mutual)” ini diatur dalam UU No.2/1992, pasal 7 (1) dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 504/KMK.06/2004.
3. Badan Perwakilan Anggota (BPA) adalah pemegang polis, memiliki kedudukan tertinggi dalam perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dan ikut serta menentukan Garis Besar Haluan Perusahaan.
4. Dalam usaha bersama, risiko dipikul oleh para peserta sendiri sebagai pemilik perusahaan (berbeda dengan PT, dimana perusahaanlah yang menanggung risikonya).
5. Tiap Anggota Bumiputera mempunyai hak memilih atau dipilih menjadi anggota BPA dalam setiap pemilihan anggota BPA untuk daerah perwakilan dimana yang bersangkutan berdomisili.
6. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kepentingan dari seluruh pemegang polis AJB Bumiputera 1912 dapat tersalurkan melalui badan perwakilan anggota yang mana ikut menentukan serta mengawasi jalannya perusahaan sehingga tidak terjadi penyimpangan didalam perusahaan.

Daftar Pustaka

- Hamid S. Attamimi, 1990, *Peranan Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912*
- Badrulzaman Mariam Darus, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- BUMIPUTERA, 2009, *Petunjuk Operasional Pemasaran*, Mardimulyo, Jakarta.
- H.Mashudi & Moch. Chidir Ali, 1998, *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung.
- Hadikusuma Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Ibrahim Johnny, 2007, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publising, Malang, Jawa Timur

Ketentuan Pasal (1) angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

Kompas Gamedia. 2009 *Asuransi Bumiputera*, edisi khusus November .

Muhammad Abdulkadir,1990, *Pokok-pokok Hukum Pertanggungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Muljadi Kartini dan Gunawan Widjaja,2004, *Perikatan Pada Umumnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Prodjodikoro Wirjono,1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Penerbit Sumur, Bandung

Purwosutjipto,H.M.N.1996, *Perlindungan Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pertanggungan*, Djambatan, Jakarta.

S.Suparman M. dan Endang, 1993, *Hukum Asuransi*, Alumni,Bandung

Sastrawidjaja,M. Suparman, Endang, 1992, *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*,alumni, Bandung

Soekanto Soerjono & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.

Subekti R., 2005, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.

Umam, Khotibul. 2011, *Memahami Dan Memilih Produk Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.